

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2021



Jalan Urip Sumohadikusumo No. 1 Pemalang, Kode Pos 52312

Telp. (0284) 324657 Pemalang



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 050/ /2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PEMALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja);
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas mengumpulkan mengkompilasi data serta menyusun Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal : Agustus 2021

**Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PEMALANG,**

**Drs. JOKO SUTRISNO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661008 198603 1 002**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
PEMALANG
NOMOR 050/ /2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2022
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Ketua	
3.	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Sekretaris	
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Plt. Kepala Bidang Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Anggota	

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
7.	Pengelola Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Anggota	Uswatun Hasanah

**Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PEMALANG**

**Drs. JOKO SUTRISNO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661008 198603 1 002**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan inayah-NYA sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang telah menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 mengacu pada kerangka arahan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagai hasil evaluasi untuk lebih efektif dan efisien dan adanya wabah pandemi covid 19, diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dan program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten pemalang. Melalui Perubahan Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan arahan dalam rangka penyesuaian belanja terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Sekian dan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PEMALANG
Sekretaris

Drs. JOKO SUTRSNO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 19730407 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud & Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penyusunan	I-6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRWIBULAN II TAHUN 2021	II-1
2.1. Persandingan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021	II-3
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	III-1
3.1. Program dan Kegiatan	III-1
BAB IV PENUTUP	VI-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyusun Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan penjabaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang disusun berpedoman pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan RKPD. Dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan daerah yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu untuk dilakukan penyesuaian juga.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Siantar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pematang Siantar telah menyusun Perubahan Renja Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, yang untuk selanjutnya menjadi acuan perencanaan untuk periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pada tahun 2021 perlu disusun perubahan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 karena :

1. Adanya penyesuaian dinamika yang disebabkan adanya pandemi global Covid-19;

2. Penyesuaian /rasionalisasi anggaran/belanja karena realisasi Silpa tahun 2020 lebih rendah dari proyeksi yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2021;
3. Rasionalisasi dan refocusing anggaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya serta;
4. Penyesuaian target kinerja di tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2021.

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi pedoman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menyusun RKA Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RKPd;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 22. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

- Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
 29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
 30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang;
 31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 94 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang;
 32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah untuk merumuskan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2022 berdasarkan penjabaran dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Menyediakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021.
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja serta Sistematika Penyusunan Renja.

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2021**

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIBUNAN II TAHUN 2021

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Dinpusarda Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 dan estimasi tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2020

Jumlah anggaran Dinpusarda Kabupaten Pemalang sebesar Rp2.451.823.000,00 yang terbagi dalam 9 program dan 43 kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp2.265.106.682,00 atau sebesar 92,38%.

Tahun Anggaran 2021 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan Dinpusarda Kabupaten Pemalang sebesar Rp7.176.580.000,00 yang terbagi dalam 3 program, 11 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Karena adanya Penyesuaian/rasionalisasi belanja daerah karena realisasi SiLPA tahun 2020 lebih rendah dari proyeksi yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2021 serta Rasionalisasi dan *refocussing* ke-2 anggaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (*Covid-19*) dan Dampaknya, maka anggaran di Dinpusarda Kabupaten Pemalang mengalami pengurangan sebesar Rp1.600.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp5.576.580.000,00 yang terbagi dalam 3 program, 11 kegiatan dan 35 sub kegiatan, dimana terdapat pengurangan 9 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp2.126.644.289,00 atau sebesar 38,14%.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan dengan menghitung realisasi kinerja dan anggaran

dibandingkan dengan targetnya. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 status capaian kinerja dan anggaran adalah sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Status
1	47,51% \leq	Sangat Tinggi (ST)
2	38,76% \leq 47,50%	Tinggi (T)
3	31,26% \leq 38,75%	Sedang (S)
4	22,51% \leq 31,25%	Rendah (R)
5	\leq 22,50%	Sangat Rendah (SR)

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan renja tahun 2020 dan perubahan renja tahun berjalan (sampai dengan tribulan II) dapat dilihat sebagaimana tabel 2.1 dibawah ini :

TABEL 2.1 PERSANDINGAN HASIL PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIBULAN II TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Anggaran Penetapan (Rp.)		Anggaran Refocusing No-2 (Rp.)		Realisasi						Capaian (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	TW I		TW II		Total			
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Dinas Perpustakaan dan Kearsifan				4,338,834,000.00															
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase gedung perpustakaan dalam kondisi baik	%	21.90		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase perpustakaan terstandarisasi	%	1.43	1,488,032,000.00	1.43	803,433,277.00	1.69	23,615,005.00	0	177,363,762.00	1.69	200,978,767.00	38.14	
	Jumlah Perpustakaan	unit	284			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	skor	55.33	330,500,000.00	55.33	13,112,000.00	0	-	0	-	0.00	-	0.00	
					Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				1,488,032,000.00	80	803,433,277.00		23,615,005.00		177,363,762.00		200,978,767.00	25.01	
						Jumlah perpustakaan daerah yang terstandarisasi	unit	1								0			
						Persentase perpustakaan tingkat daerah yang dikelola	%	100								0			
						Jenis layanan (pemalang yang berkembang dan terpelihara (jenis)	kegiatan	4	25,000,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Anggaran Penetapan (Rp.)		Anggaran Refocusing ke-2 (Rp.)		Realisasi						Capaian (%)
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	TW I		TW II		Total		
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca masyarakat	jenis	3 Layanan	200,000,000.00	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan rujukan yang berkembang (unit)	Unit	1	285,000,000.00	3	183,582,000.00	1	20,143,255	1	91,245,762	1	111,389,017	60.68
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Jumlah perpustakaan keliling yang dapat diselenggarakan dan publikasi yang dihasilkan.	pusling	960 Pusing	265,000,000.00														
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Jumlah perpustakaan yang sarana dan prasarannya terfasilitasi	eksempilar	2400	338,500,000.00	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten yang berkembang	layanan	4		0	70,000,000.00	0	0	1225	65,350,000	1225	65,350,000	93.36
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah penyediaan buku yang dapat diadakan.	judul/eksempilar	1500 Judul /3500 eksemplar	215,000,000.00														
Perencanaan dan penyusunan program budaya baca	Jumlah jenis data layanan perpustakaan yang dihasilkan	data	5 Data	20,000,000.00	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah database perpustakaan yang tersusun	Database	4	5,000,000.00	4	5,000,000.00	0	450,000	0	300,000	0	750,000	15.00

Program/Kegiatan/Su- b Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Program/Kegiatan/Su- b Kegiatan	Indikator	Satuan	Anggaran Penetapan (Rp.)		Anggaran Refocusing ke-2 (Rp.)		Realisasi						Capaian (%)
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	TW I		TW II		Total		
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				350.500.000,00	9	13.112.000,00							0,00
					Keluaran Kegiatan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	skor	55,33				0						
					Hasil Kegiatan	Persentase capaian aktivitas pembudayaan gemar membaca dibanding target pada tahun berkennan	%	100								0,00		
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah penyelenggaraan Pameran Buku dan Event Gerakan Perasyarakatan Minat Baca	kegiatan	2 Kegiatan	230.000.000,00	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat yang dilaksanakan	kegiatan	1	128.250.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
					Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Taman Baca Masyarakat yang terbangun	unit	1	60.000.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
						Jumlah Taman Baca Masyarakat yang terpelihara	unit	1	10.000.000,00			0	0	0	0	0,00	0	0,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Anggaran Penetapan (Rp.)		Anggaran Refocusing ke-2 (Rp.)		Realisasi				Capaian (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	TW I		TW II			Total	
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun	dokumen	4	20,100,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Doku men	3	9,000,000.00	3	9,000,000.00	0	0	1	1,790,000	1.00	1,790,000	19.89
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Doku men	1	2,081,000.00	1	1,740,800.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Doku men	1	2,027,000.00	1	4,071,000.00	0	0	1	0	1.00	0	0.00
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	Doku men	1	2,050,600.00	1	2,050,000.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Doku men	1	2,026,000.00	0	3,026,000.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia.		100%															
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	dokumen	3	4,700,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Doku men	3	2,431,000.00	3	2,431,000.00	3	0	0	0	3.00	0	0.00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah perputakaan/embaga/instansi yang di money	kali	20	19,500,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	2	25,000,000.00	2	7,633,000.00	0	0	1	5,546,000	1.00	5,546,000	72.66
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,682,152,000.00		3,680,782,300.00		642,412,722.00		860,594,564.00		1,503,007,286.00	40.83
					Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	2				1.00				1.00		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Anggaran Penetapan (Rp.)		Anggaran Refocusing ke-2 (Rp.)		Realisasi				Capaian (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	TW I		TW II			Total		
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Hasil Kegiatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100				50,00				50,00			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	Orang/bulan	23/12	3.676.580.000,00	23	3.676.580.000,00	23/3	642.412.722		23/3	860.519.564	23/6	1.502.932.286	40,88
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	Dokumen	1	2.785.000,00	1	2.785.000,00	1	0	0	75,000	1,00	75,000	2,69	
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan semester dan prognosis realisasi keuangan yang tersusun	dokumen	2	2.375.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	Dokumen	1	2.785.000,00	1	1.415.300,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpekahtinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	bulan	12		Administrasi Umum Perangkat Daerah				333.688.800,00	116	233.572.523,00	20,00	9.035.402,00		73.122.641,00		82.158.043,00	35,17	
					Kebijakan Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	layanan	8				7			7		7		
					Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100,00				100,00			100,00		100,00		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Anggaran Penetapan (Rp.)		Anggaran Refocusing ke-2 (Rp.)		Realisasi				Capaian (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	TW I		TW II			Total	
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	palet	1	10,000,000.00	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	jenis/bulan	19 jenis/12 bulan	8,990,900.00	19/1	7,873,700.00	0	0	6 jenis/12 bulan	3,507,100	11 jenis/12 bulan	3,507,100	44.54
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	unit	10	18,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	unit	11	29,172,000.00	11	15,135,000.00	0	0	9	10,210,000	9.00	10,210,000	67.46
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	unit	2	20,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis/bulan	9 jenis/12 bulan	9,607,700.00	9/12	9,607,700.00	3 jenis/12 bulan	40,000	3 jenis/12 bulan	4,787,150	6 jenis/12 bulan	4,827,150	50.24
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	palet	2	90,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	jenis/bulan	5 jenis/12 bulan	95,378,200.00	5/12	102,076,100.00	2 jenis/12 bulan	1,243,702	1 jenis/12 bulan	23,803,954	3 jenis/12 bulan	25,047,656	24.54
Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhiya kebutuhan makanan dan minuman setiap bulan.	jenis/bulan	9/12	33,000,000.00														
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis/bulan	11/12	20,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	jenis/bulan	9 jenis/12 bulan	20,000,000.00	9/12	18,752,023.00	1 jenis/12 bulan	205,200	3 jenis/12 bulan	6,414,500	4 jenis/12 bulan	6,619,700	35.30
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan di	jenis/bulan	9/12	20,000,000.00	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	jenis/bulan	8 jenis/12 bulan	20,000,000.00	8/12	19,500,000.00	8 jenis/3 bulan	4,202,000	8 jenis/3 bulan	3,323,000	8 jenis/6 bulan	7,525,000	38.59
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Terpenuhiya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan.	kegiatan	155	350,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	kegiatan	105	150,540,000.00	105	60,628,000.00	20	3,344,500	30	21,076,937	50.00	24,421,437	40.28

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Anggaran Penetapan (Rp.)		Anggaran Refocusing ke-2 (Rp.)		Realisasi				Capaian (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	TW I		TW II			Total	
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan.	bulan	12		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				93.396.600,00		19.989.000,00							0,00
						Jumlah barang milik daerah yang tersedia	unit	16						0		14,00		
						Hasil Kegiatan	%	100,00				0,00		0,00		100,00		
Pembangunan gedung kantor	Terpenuhi kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan.			0,00														
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan.	unit	1	49.190.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit	1	30.395.200,00	1	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
						Jumlah mebel yang tersedia	unit	14	9.989.000,00	14	9.989.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Pengadaan komputer dan periferalnya	Terpenuhi kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan.		6	77.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	6	53.012.400,00	1	10.000.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Anggaran Penetapan (Rp.)		Anggaran Refocusing ke-2 (Rp.)		Realisasi						Capaian (%)
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	TW I		TW II		Total		
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpeenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan.	bulan	12		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa		448.480.000,00		420.538.000,00	132	65.902.753,00		97.840.879,00	132,00	163.743.632,00	38,94
					Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia		3				3		3				
					Hasil Kegiatan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%	100,00				100,00		100,00				
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah terlaksananya pengolahan surat menyurat selama satu tahun	surat	500	87.800.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	surat	500	6.600.000,00	500	5.108.000,00	132	300,000	125	100,000	257,00	400,000	7,83
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air setiap bulan	jenis/bulan	4/12	134.000.000,00	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	jenis/ bulan	4 jenis/ 12 bulan	132.880.000,00	4/12	106.430.000,00	4 jenis/ 12 bulan	16.602,753	4 jenis/ 12 bulan	22.240,879	4 jenis/ 12 bulan	38.843,632	36,50
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tersedianya jasa administrasi keuangan setiap bulan	orang/bulan	23	27.600.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non-ASN yang dibayar setiap bulan	orang/bulan	23/12 bulan	309.000.000,00	23/12	309.000.000,00	23 orang/ 12 bulan	49.000,000	23 orang/ 12 bulan	75.500,000	23 orang/ 12 bulan	124.500,000	40,29
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tersedianya jasa kebersihan kantor setiap bulan	orang/bulan	1	77.000.000,00														
Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah tersedianya Jasa Keamanan setiap bulan	orang/bulan	1	24.000.000,00														

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Anggaran Penetapan (Rp.)		Anggaran Refocusing ke-Z (Rp.)		Realisasi						Capaian (%)
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	TW I		TW II		Total		
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	unit		255.090.000,00		240.250.500,00	3	10.454.000,00		116.389.788,00		126.743.788,00	32,75
					Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	unit	156				7					15,00	
					Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%	100,00				12,50			14,29		26,79	
			12	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	unit	32	138.090.000,00	22	121.698.500,00	2	9.529,000		10.466,288		19.995,288	16,43
			12	115.000.000,00														
			12	0,00	Pemeliharaan rutin/berkala mobil/jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	unit											
			12	20.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	123	20.000.000,00	123	16.120.000,00	1	925,000		3.400,000		4.325,000	26,83
			2/2	90.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	unit	1	97.000.000,00	1/1.000	102.432.000,00	0			102.423,500		102.423,500	99,99

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Anggaran Penetapan (Rp.)		Anggaran Refocusing ke-2 (Rp.)		Realisasi						Capaian (%)
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	TW I		TW II		Total		
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhi kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan.	bulan	12	5,000,000.00	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara												
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhi kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan.	bulan	12	10,000,000.00	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara												
Pemeliharaan rutin/berkala bahan bacaan dan perundang-undangan	Terpenuhi kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan.	bulan	12	27,000,000.00														
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Pengolahan arsip secara baku presentase desa/keurahan yang telah mengelola arsip secara baku.	%	59,62 100,00		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%	10,00	500,625,000.00	134,350,600.00	0	0	42,676,773.00	0,00	42,676,773.00	0,00	42,676,773.00	31,62
					Pengelolaan Arsip Daerah Kabupaten/Kota				259,825,000.00	97,041,000.00	0	0	40,047,600.00	40,047,600.00	40,047,600.00		40,047,600.00	41,27
					Keluaran Kegiatan	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	beras	500						271		271,00		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Anggaran Penetapan (Rp.)		Anggaran Refocusing ke-2 (Rp.)		Realisasi				Capaian (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	TW I		TW II			Total	
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Hasil Kegiatan	Persentase arsip dinamis yang dikelola yang terkelola	%	100,00				0		54,20		54,20		
Kajian sistem administrasi kearsipan	Jumlah peraturan yang dapat diterbitkan	Perbud	2	20,000,000.00	Penciptaan dan Penggabungan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang diciptakan dan digunakan	berkas	500	18,000,000.00	1	14,050,000.00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase arsip yang diilhamedakan.	%	15		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip aktif yang telah dibustan daftar arsip	berkas	460	151,825,000.00	5/2	67,304,000.00	0	0	271	39,747,600	271,00	39,747,600	59,06
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah sarana pengolahan arsip yang tersedia	unit	8	36,000,000.00		Jumlah arsip in-aktif yang telah dibustan daftar arsip	berkas	46								0,00	0	
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah dokumen/arsip daerah yg terdata dan terata	berkas	2,000	66,000,000.00		Jumlah arsip dinamis yang terpelihara	berkas	46								0,00	0	
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase penyelenggaraan kearsipan dalam kondisi baik.																	
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Jumlah pemeliharaan yg dilaksanakan		2 jenis	54,000,000.00														
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan	Persentase arsiparis yang memiliki kompetensi.				Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	rekomendasi	7	90,000,000.00	1	15,687,000.00	0	0	0	300,000	0,00	300,000	1,91

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran	Target	Anggaran (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Anggaran Penetapan (Rp.)		Anggaran Refocusing ke-2 (Rp.)		Realisasi						Capaian (%)
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	TW I		TW II		Total		
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan bimek kearsipan dan sosialisasi Perda kearsipan	Jumlah peserta bimek kearsipan dan sosialisasi Perda kearsipan			115.000.000,00														
					Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota				75.000.000,00		30.862.000,00	0			169.500,00		169.500,00	0,55
					Keluaran Kegiatan	Jumlah arsip statis yang dikelola	berkas	500				0			3		3,00	
					Hasil Kegiatan	Persentase arsip statis yang terkelola (%)	%	100							0,60		0,60	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah SKPD dan desa yg di money dan jumlah SKPD dan desa yg mendapat fasilitasi penataan arsip	Instansi/ lembaga	30	129.000.000,00	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	berkas	500	75.000.000,00	10	30.862.000,00	0	0	3	169.500	3,00	169.500	0,55
						Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	berkas	500				0			3		3,00	0
					Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota				165.800.000,00		7.047.600,00	0			2.459.673,00		2.459.673,00	34,90

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Anggaran Penetapan (Rp.)		Anggaran Refocusing ke-2 (Rp.)		Realisasi				Capaian (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	TW I		TW II			Total		
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						Jumlah Aktivitas Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsifan	kegiatan	1				0		0					
						Hasil Kegiatan	%	100				0		0					
Pemeliharaan peralatan jaringan aplikasi kearsifan yg disediakan dan pemeliharannya	Jumlah peralatan jaringan kearsifan yg disediakan dan pemeliharannya	unit/bulan	1/12	107.684.000,00	Penyediaan Informasi, Aides dan Layanan Kearsifan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah arsip yang dikumpulkan dalam JIKD melalui SIRK	bertas	500	85.000.000,00	3	7.047.600,00	0	0	0	2.459.673	0,00	2.459.673	34,90	
Penyediaan sarana pelayanan informasi arsip yang dapat disediakan	Jumlah sarana pelayanan informasi arsip yang dapat disediakan			36.000.000,00															
Penyelenggaraan pameran kearsifan	Jumlah ketertarikan dalam pameran kearsifan di tk kab dan tk prov			105.385.000,00	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsifan dan Lembaga Kearsifan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung pameran kearsifan (orang/kegiatan)	orang/kegiatan	100 orang/2 kegiatan	80.800.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	

Dari evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, meskipun secara keseluruhan capaian kinerja sampai dengan tribulan II Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya mencapai 38,14 % atau status kategori **Sedang (S)**, tapi sebenarnya masih terdapat beberapa sub kegiatan dengan status capaian kinerja **Rendah (R)** sebanyak 2 sub kegiatan yaitu : Penyediaan Bahan Logistik Kantor (24,54)%, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (26.83)% dan **Sangat Rendah (SR)** sebanyak 18 sub kegiatan yaitu : Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (4,31)%, Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (15)%, Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca (0)%, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(19,89)%, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (0)%, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (0)%, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (0)%, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (0)%, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (0)%, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (2,69)%, Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (0)%, Pengadaan Mebel (0)%, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (0)%, Penyediaan Jasa Surat Menyurat (7,83)%, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (16,43), Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis (0)%, Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota (1,91)%, Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis (0,55)%.

Hal ini disebabkan karena :

1. Adanya pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan untuk kegiatan yang mengundang banyak orang, sehingga menyebabkan tertundanya banyak kegiatan yang berupa pembinaan/sosialisasi, pelatihan teknis dan sebagainya;
2. Adanya rasionalisasi/refocusing anggaran sehingga terjadi pergeseran anggaran dan penjadwalan ulang pada beberapa kegiatan;
3. Kegiatan dilaksanakan di tribulan III dan tribulan IV Tahun 2021

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2021. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 :

Adapun secara garis besar uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 antara lain :

1. Program Pembinaan Perpustakaan

a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
- 2) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
- 4) Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
- 5) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 6) Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
- 7) Pengembangan Bahan Pustaka
- 8) Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
- 2) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
- 4) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pengadaan Mebel
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Program Pengelolaan Arsip

a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
- 2) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
- 3) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
- 2) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan dan plafond anggaran tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas, ditetapkan setelah melalui pembahasan dan kondisi keuangan daerah dengan PD yang membidangi perencanaan, sehingga untuk pelaksanaan program dan kegiatan dipilih dan disesuaikan dengan rencana target sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021 – 2026, terutama yang menyangkut upaya peningkatan perpustakaan dan kearsipan.

Tabel 3.1 Rekap Perubahan Tahun 2021

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satu an	Target Kinerja				Anggaran (Rp)				Selisih Dengan Refocusing		Selisih Dengan Penetapan		OPD	Alasan Perubahan
					Penetapan	Refo- cusing	Perubah- an	Penetapan	Refocusing	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%				
1	TOTAL				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	ANGGARAN										8,862,000							
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan terstandarisasi	Persentase perpustakaan terstandarisasi	%	1.43	1.43	1.43		1,488,032,000	803,433,277	8,862,000.00	(174,720,000)	(95)	(1,479,170,000)	(97)	DINPUSA RDA	Pengurangan Anggaran untuk penanganan covid-19	
02.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	skor	55.33	55.33	55.33		390,500,000	13,112,000						DINPUSA RDA		
02.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan daerah yang terstandarisasi	Jumlah perpustakaan daerah yang terstandarisasi	unit	94.92	80	80		1,488,032,000	803,433,277	8,862,000.00	(174,720,000)	(95)	(1,479,170,000)	(97)	DINPUSA RDA		
	Hasil Kegiatan	Persentase perpustakaan tingkat daerah yang terkelola	Persentase perpustakaan tingkat daerah yang terkelola	%	100											DINPUSA RDA		
02.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jenis layanan Pemalang yang berkembang dan terpelihara	Jenis layanan Pemalang yang berkembang dan terpelihara	kegiatan	4	0	0		25,000,000	0						DINPUSA RDA		
02.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tipe perpustakaan Daerah	Tipe perpustakaan Daerah	tipe	B	B	B		730,000,000	544,851,277						DINPUSA RDA		
02.23.02.2.01.04	Pembinaan pada satuan sekolah, desa, Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah, desa, kecamatan dan taman baca masyarakat yang terbina	Jumlah perpustakaan sekolah, desa, kecamatan dan taman baca masyarakat yang terbina	unit	70	0	0		25,000,000	0						DINPUSA RDA		
02.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat	Jumlah Perpustakaan OPD, ormas,	Jumlah Perpustakaan OPD, ormas,	unit	10	0	0		5,000,000	0						DINPUSA RDA		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegi atan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satu an	Target Kinerja						Anggaran (Rp)		Selisih Dengan Refofocusing		Selisih Dengan Penetapan		OPD	Alasan Perubahan
					Penetapan	Refo focusing	Perubah an	Penetapan	Refofocusing	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%				
1	Kabupaten/Kota	lembaga keagamaan, pmpes yang terbina	lembaga keagamaan, pmpes yang terbina	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
02.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas perpustakaan	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas perpustakaan	orang	120	0	0	110,000,000	0								DINPUSA RDA	
02.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan rujukan yang berkembang	Jumlah perpustakaan rujukan yang berkembang	unit	1	3		285,000,000	183,582,000	8,862,000.00	(174,720,000)	(95)	(276,138,000)	(97)			DINPUSA RDA	Pengurangan Anggaran untuk penanganan penangan covid-19
02.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten yang berkembang	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten yang berkembang	layanan	4												DINPUSA RDA	
02.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, tenaga Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah database perpustakaan yang tersusun	Jumlah database perpustakaan yang tersusun	Eksemplar data base	4755	1225		303,032,000	70,000,000								DINPUSA RDA	
02.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	skor	55.33	55.33		5,000,000	5,000,000								DINPUSA RDA	
	Hasil Kegiatan	Persentase capaian pembudayaan gemar	Persentase capaian pembudayaan gemar dibanding target	%	100	100		330,500,000	13,112,000								DINPUSA RDA	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegi atan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satu an	Target Kinerja						Anggaran (Rp)		Selisih Dengan Refocusing		Selisih Dengan Penetapan		OPD	Alasan Perubahan
					Penetapan	Refo cusing	Perubah an	Penetapan	Refo cusing	Perubahan	Bertambah /(Berurang) (Rp)	%	Bertambah /(Berurang) (Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
02.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	membaca dibanding target pada tahun berkenaan	pada tahun berkenaan	kegiatan	1	0		128,250,000	0						DINPUSA RDA			
02.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah Taman Baca Masyarakat yang terbangun	unit	1	0		60,000,000	0						DINPUSA RDA			
02.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Taman Baca Masyarakat yang terpelihara	Jumlah Taman Baca Masyarakat yang terpelihara	unit	1			10,000,000							DINPUSA RDA			
02.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah penerima Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Penerima Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	orang	4	4		75,000,000	13,112,000						DINPUSA RDA			
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan literasi berbasis inklusi sosial	orang/ kegiatan	100 orang/ 5 Kegiatan	0		57,250,000	0						DINPUSA RDA			

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satu an	Target Kinerja			Anggaran (Rp)			Selisih Dengan Refocusing		Selisih Dengan Penetapan		OPD	Alasan Perubahan
					Penetapan	Refo- cusing	Perubah- an	Penetapan	Refocusing	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	NILAI SAKIP	Skor	48.58	127.00		3,726,767,600	3,710,794,100						DINPUSA RDA	
		NILAI IRB	NILAI IRB	Skor	54.62	127		1,130,655,400	914,350,023						DINPUSA RDA	
02.23.01.2.01	Perencanaan, Penanganan, evaluasi kinerja Perangkat Daerah Keluara Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokum- en	11	11		44,615,600	29,951,800						DINPUSA RDA	
	Hasil Kegiatan	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akutabel dan tepat waktu	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuratabel dan tepat waktu	%	100	100									DINPUSA RDA	
02.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokum- en	3	3		9,000,000	9,000,000						DINPUSA RDA	
02.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang tersusun	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	dokum- en	1	1		2,081,000	1,740,800						DINPUSA RDA	
02.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD yang tersusun	dokum- en	1	1		2,027,000	4,071,000						DINPUSA RDA	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegi atan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satu an	Target Kinerja						Anggaran (Rp)			Selisih Dengan Refocusing		Selisih Dengan Penetapan		OPD	Alasan Perubahan
					Penetapan	Refo cusing	Perubah an	9	10	11	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
02.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	dokum en	1	1		2.050,600	2.050,000						DINPUSA RDA				
02.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	dokum en	1	0		2.026,000	3.026,000						DINPUSA RDA				
02.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dokum en	3	3		2.431,000	2.431,000						DINPUSA RDA				
02.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokum en	2	2		25,000,000	7,633,000						DINPUSA RDA				
02.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluasan Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	dokum en	2			3,682,152,000	3,680,782,300						DINPUSA RDA				
	Hasil Kegiatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%		100									DINPUSA RDA				
02.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	Orang/ bulan	23/12	23/13		3,676,580,000	3,676,580,000						DINPUSA RDA				
02.23.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	dokum en	1	1		2,786,000	2,786,000						DINPUSA RDA				

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan Kegiatan (Perubahan)	Satu an	Target Kinerja				Anggaran (Rp)			Selisih Dengan Refocusing		Selisih Dengan Penetapan		OPD	Alasan Perubahan
					Penetapan	Refo- cusing	Perubah- an	Penetapan	Refofocusing	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
02.23.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	dokumen	1	1		2.785,000	1.416,300						DINPUSA RDA		
02.23.01.2.06	Administrasi Umum Peringkat Daerah					116		333,688,800	233,572,523						DINPUSA RDA		
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	layanan	8										DINPUSA RDA		
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang diperlancar pelaksanaan tugas	Persentase ketersediaan administrasi umum yang diperlancar pelaksanaan tugas	%	100										DINPUSA RDA		
02.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis/bulan	9/12	9/12		8,990,900	7,873,700						DINPUSA RDA		
02.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	unit	11	11		29,172,000	15,135,000						DINPUSA RDA		
02.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Jenis/bulan	9/12	9/12		9,607,700	9,607,700						DINPUSA RDA		
02.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis/bulan	5/12	5/12		95,376,200	102,076,100						DINPUSA RDA		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	Jenis barang cetakan yang tersedia	Jenis/bulan	9/12	9/12		20,000,000	18,752,023						DINPUSA RDA		
02.23.01.2.06.05	Penyediaan bahan bacaan dan	Jenis surat kabar yang tersedia	Jenis surat kabar yang tersedia	Jenis/bulan	8/12	8/12		20,000,000	19,500,000						DINPUSA RDA		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satu an	Target Kinerja					Anggaran (Rp)			Selisih Dengan Refocusing		Selisih Dengan Penetapan		OPD	Alasan Perubahan
					Penetapan	Refo- cusing	Perubah- an	Penetapan	Refocusing	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%				
1	Peraturan Perundang- undangan	tersedia		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
02.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	kegiatan	105	105		150,540,000	60,628,000								DINPUSA RDA	
02.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							93,396,600	19,989,000								DINPUSA RDA	
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang yang tersedia	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	unit	16												DINPUSA RDA	
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperkirakan pelaksanaan tugas	Persentase barang milik daerah yang memperkirakan pelaksanaan tugas	%	100												DINPUSA RDA	
02.23.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas yang tersedia	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit	1	0		30,395,200	0								DINPUSA RDA	
02.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Jumlah mebel yang tersedia	unit	14	14		9,989,000	9,989,000								DINPUSA RDA	
02.23.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	6	1		53,012,400	10,000,000								DINPUSA RDA	
02.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							448,480,000	420,538,000								DINPUSA RDA	
	Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	jasa	3	3											DINPUSA RDA	
	Hasil Kegiatan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperkirakan	%	100	100											DINPUSA RDA	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satu an	Target Kinerja				Anggaran (Rp)			Selisih Dengan Refocusing		Selisih Dengan Penetapan		OPD	Alasan Perubahan
					Penetapan	Refo- cusing	Perubah- an	Penetapan	Refocusing	Perubahan	Bertambah (/Berkurang) (Rp)	%	Bertambah (/Berkurang) (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	pelaksanaan tugas														
02.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Jumlah surat dinas yang terkirim	surat	500	500		6,600,000	5,108,000						DINPUSA RDA		
02.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening sumber daya yang dibayar tiap bulan	Jumlah rekening sumber daya yang dibayar tiap bulan	jenis/b ulan	4/12	4/12		132,880,000	106,430,000						DINPUSA RDA		
02.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umur Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	orang/ bulan	23/12	23/12		309,000,000	309,000,000						DINPUSA RDA		
02.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah yang terpelihara	Jenis barang milik daerah yang terpelihara	unit	156	156		255,090,000	240,250,500						DINPUSA RDA		
		Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100									DINPUSA RDA		
02.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan tgerpelihara	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan tgerpelihara	unit	32	22		138,090,000	121,698,500						DINPUSA RDA		
02.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	123	123		20,000,000	16,120,000						DINPUSA RDA		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja				Anggaran (Rp)			Selisih Dengan Refocusing		Selisih Dengan Penetapan		OPD	Alasan Perubahan
					Penetapan	Refo- cusing	Perubah- an	Penetapan	Refocusing	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
02.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	unit	1	1		97,000,000	102,432,000						DINPUSA RDA		
2:24:02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%	100	100		500,625,000	134,950,600						DINPUSA RDA		
02.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	berkas	500	500		259,825,000	97,041,000						DINPUSA RDA		
	Hasil Kegiatan	Persentase arsip dinamis yang dikelola	Persentase arsip dinamis yang dikelola	%	100	100									DINPUSA RDA		
02.24.02.2.01.01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	berkas	500	1		18,000,000	14,050,000						DINPUSA RDA		
02.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	berkas	460	5/2		151,825,000	67,304,000						DINPUSA RDA		
		Jumlah arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	berkas	46	46									DINPUSA RDA		
		Jumlah arsip dinamis yang terpelihara	Jumlah arsip dinamis yang terpelihara	berkas	46	46									DINPUSA RDA		
02.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	rekomendasi	7	1		90,000,000	15,687,000						DINPUSA RDA		
02.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							75,000,000	30,862,000						DINPUSA RDA		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegi atan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satu an	Target Kinerja						Anggaran (Rp)		Selisih Dengan Refocusing		Selisih Dengan Penetapan		OPD	Alasan Perubahan
					Penetapan	Refo cusing	Perubah an	Penetapan	Refo cusing	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%				
1					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Keluaran Kegiatan	Jumlah arsip statis yang terkelola	Jumlah arsip statis yang terkelola	berkas	500	500	500											
	Hasil Kegiatan	Persentase arsip statis yang terkelola	Persentase arsip statis yang terkelola	%	100	100	100											
02.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	berkas	500	500	10		75,000,000	30,862,000								
		Jumlah arsip statis yang telah dilakukan sarana bantu sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dilakukan sarana bantu sarana bantu temu balik	berkas	500	500												
02.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah informasi kearsipan yang terkelola dalam JIKD	Jumlah aktivitas pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan	kegiatan	1				165,800,000	7,047,600								
	Hasil Kegiatan	Persentase informasi kearsipan yang terkelola dalam JIKD	Persentase aktivitas pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan (%)	%	100.00													
02.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam JIKD melalui SIKD	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam JIKD melalui SIKD	berkas	500	500	3		85,000,000	7,047,600								
02.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga	Jumlah pengunjung pameran kearsipan	Jumlah pengunjung pameran kearsipan	orang/kegiatan	2	100 orang/2 kegiatan	0		80,800,000	0								

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Perubahan)	Satu an	Target Kinerja					Anggaran (Rp)		Selisih Dengan Refocusing		Selisih Dengan Penetapan		OPD	Alasan Perubahan
					Penetapan	Refo cusing	Perubah an	Penetapan	Refocusing	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 merupakan perubahan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang telah ditetapkan, yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026. Memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang telah disesuaikan dengan perubahan, sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target tahun 2021.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 mempunyai fungsi yang sangat strategis, yaitu :

1. Menjadi pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021;
2. Sebagai landasan bagi penyusunan RKA Perubahan (RKAP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021;
3. Menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja;
4. Sebagai dokumen perencanaan strategis sehingga berdampak pada pencapaian indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan melalui serangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam penjabarannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 ini akan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang makin meningkat dan pelayanan publik yang semakin baik.

Pemalang, September 2021

Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
KABUPATEN PEMALANG
Sekretaris

Drs. JOKO SUTRISNO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19661008 198603 1 002